

EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA CIKADU KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA

Andi*, Yanti Heryanti, Putri Syifa Novia Rahmah
Ilmu Administrasi Negara, STIA YPPT Tasikmalaya
E-mail: andistiatsm@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effectiveness of Village Cash Direct Assistance in Cikadu Village, Cikalong District, Tasikmalaya Regency. The theory that became the basis of his analysis of the effectiveness measure of Duncan which consists of 3 variables, namely goal achievement, integration and adaptation. The research method used is descriptive with a qualitative approach, while the data collection techniques are interviews, observation and documentation. The informants are the Village Head, Head of Welfare, Head of Dusun and the beneficiary community. The results showed that the Village Fund Direct Cash Assistance program in Cikadu Village, Cikalong District, Tasikmalaya Regency had been implemented well. However, in the direct cash assistance program, village funds still have to be frequently disseminated to the community so that people who do not receive assistance are not socially jealous and there is a need for increased communication to beneficiary families so that there is no delay in taking aid.

KeyWord: Effectiveness, Direct Village Fund Cash Assistance.

PENDAHULUAN

Desa merupakan sebuah gambaran dan suatu kesatuan masyarakat yang tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal dengan baik dan memiliki corak kehidupan relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014, desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya kebijakan ini yang mengatur tentang desa, dengan tujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa juga mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintah desa serta daya saing desa.

Desa seringkali dianggap memiliki berbagai situasi problematik, diantaranya kemiskinan yang disebabkan adanya pengetahuan yang rendah. Namun, keberadaan desa secara yuridis dan formal juga telah diakui pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Pada saat ini kedudukan desa sebagai subjek pembangunan yang tentunya di desa harus dilakukannya pemerataan pembangunan. Salah satu cara mempercepat pembangunan juga meningkatkan keterjangkauan wilayah tertinggal maka pemerintah pusat melakukan usaha untuk mengatasi hal tersebut melalui kebijakan Dana Desa. Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dengan tujuan mendanai kegiatan-kegiatan yang ada di desa seperti program-program pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pemerintahan desa. Berdasarkan data DJPKeuangan Negara Indonesia yang terdapat pada lampiran I Peraturan Bupati

Kabupaten Tasikmalaya No. 7 tahun 2021, pada tahun 2021 pemerintah kabupaten Tasikmalaya menerima dana desa sebesar Rp. 402.887.661.000,-. Adapun pagu dana desa di Desa Cikadu pada tahap pertama dan kedua yaitu sebesar Rp. 417.588.800,-. Pagu dana desa tersebut diprioritaskan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin terdampak pandemi covid 19.

BLT atau Bantuan Langsung Tunai merupakan program pemerintah yang memberikan bantuan berupa uang tunai atau bantuan lainnya terhadap masyarakat miskin dengan ada syarat maupun tidak bersyarat. Di Indonesia bantuan langsung tunai mulai dilaksanakan pada oktober 2005 hingga desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga penerima manfaat dengan sasaran utamanya ialah keluarga miskin yang memilik anak usia antara 0 sampai dengan 15 tahun juga ibu hamil. Pada saat itu KPM mendapatkan transfer uang tunai sebesar Rp. 300.000,- yang diberikan atau dikirim melalui kantor pos. Pemberian BLT dilakukan secara tiga tahap, total bantuan yang diterima keluarga penerima manfaat ialah RP. 1.200.000,-. Berselang tiga tahun kemudian program ini kemudian digerakan kembali, tetapi nominal yang diberikan kepada masyarakat dikurangi menjadi Rp.900.000,- akan tetapi berhenti setelah sembilan bulan berjalan. Kemudian pada tahun 2013 BLT berganti nama menjadi BLSM atau Bantuan Langusng Sementara Masyarakat. BLSM tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan banyak maladministrasi yang terjadi seperti banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan, penggunaan data tidak valid, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap implementasi BLSM dan lainnya.

Setelah kurang lebih tujuh tahun kemudian program sejenis dijalankan kembali dengan nama BLT Desa. Bantuan langsung tunai desa merupakan bantuan yang berasal dari alokasi dana desa yang

dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dikarenakan pandemi. Adapun besarnya BLT yang diberikan ialah Rp. 300.000,- perbulan selama tiga tahap, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 7 Tahun 2021.

Bantuan ini merupakan salah satu program yang bertujuan sebagai penanganan dampak covid 19 dengan sasaran utama ialah masyarakat miskin yang bukan prima bantuan lain seperti PKH, kartu sembako dan lainnya. Kepala desa bertanggungjawab atas penyaluran atau penggunaan dana desa termasuk bantuan langsung tunai yang disertai pendampingan dari pemerintah daerah.

Pengalokasian dana desa pada tahap pertama dan kedua diprioritaskan untuk pemberian bantuan langsung tunai desa. Maka pemerintah desa diwajibkan untuk menganggarkan dan melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa dengan berpedoman pada perubahan APBDes. Adapun desa atau pemerintah desa yang tidak menganggarkan dan melaksanakan BLT-DD akan mendapatkan sanksi berupa pengehntian penyaluran dana desa tahap tiga dan pemotongan dana desa sebesar 50% dari dana desa yang disalurkan ditahap dua pada tahun anggaran berikutnya untuk desa mandiri. Pemerintah desa yang melakukan pemotongan BLT Dana Desa juga akan diberikan sanksi atau dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi.

Terdapat beberapa gejala permasalahan mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi/informasi kepada KPM BLT-DD. Sosialisasi yang dilaksanakan hanya 1x ketika awal adanya program BLT-DD. Kemudian informasi terkait pembagian atau pemberian bantuan selalu mendadak,

jadi KPM yang terlambat harus mengambil bantuan tersebut ke kantor POS tanpa didampingi dan hanya membawa KK dan surat undangan yang diberikan pihak desa

2. Kurangnya tenaga kerja yang menangani terkait BLT-DD, dimana

pegawai yang menangani program bantuan ini ialah tupoksi dari kasi kesra tetapi dikarenakan kurangnya tenaga kerja maka kasi kesra dibantu oleh sekertaris desa dalam penyelenggaraannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Efektivitas

Efektivitas landasan dari setiap organisasi dalam pencapaian tujuannya, karena apabila suatu instansi dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dengan efektif maka instansi tersebut bisa dikatakan maksimal dalam penggunaan sumber daya manusia yang handal.

Kata efektif berasal dari bahasa inggris "*effective*" yang artinya sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Georgopualos dan Tannebaum yang diterjemahkan dalam (Tangkilisan, 2005) "Efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan, dan pemanfaatan tenaga manusia".

Sedangkan menurut Miller dalam (Tangkilisan, 2005) "*Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal attainments.*" (Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus)

Pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Hal tersebut dikemukakan Steers dalam (Sutrisno, 2018)

Efektivitas menurut Emerson dalam (Handayaningrat, 1990) yaitu: Pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif.

Jadi kalau sasaran atau tujuan itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif.

Sementara (Gie, 1981) mengemukakan efektivitas ialah terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Jadi perbuatan seseorang yang efektif adalah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.

Efektivitas merupakan salah satu indikator pokok untuk mencapai tujuan juga sasaran yang sudah ditentukan pada setiap organisasi. Program maupun kegiatan dinyatakan efektif apabila telah mencapai tujuan dan sasaran seerti yang sudah ditentukan. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditentukan dengan pelaksanaan ataupun hasil dari perencanaan. Adapun Georgepolous dan Tannemaum dalam (Steers, 1985) mengatakan bahwa "efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, rumusan keberhasilan organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan mengejar sasarannya. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan-tujuan organisasi."

Menurut Cameron dan Whetten dalam (Sutrisno, 2018) pertama konsep efektivitas organisasional secara teoretis terletak pada semua model organisasional, kedua efektivitas secara empiris berfungsi sebagai variabel penting dalam kegiatan riset dan konsep penting dalam penafsiran fenomena organisasional, ketiga kebutuhan untuk

membuat judgements tentang kinerja berbagai organisasi.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa efektivitas menurut (Siagian, 2006) adalah Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung bilamana tugas tersebut diselesaikan dan tidak terutama cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Selanjutnya menurut Hasibuan (2006) efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Djamin (1995) mengemukakan bahwa efektivitas didapatkan dengan menyebutkan indikasi dari cara kerja pegawai, kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan hasil kerjanya.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa faktor waktu, cara kerja, kemampuan menyesuaikan diri dan hasil pelaksanaan pekerjaan merupakan hal yang penting bagi suatu organisasi.

Kajian tentang faktor penentu efektivitas menurut Djamin (1995) mengacu pada dua kepentingan, yaitu:

- a. Kepentingan teoritis, dimaksudkan untuk memperoleh tilikan yang mendalam mengenai fungsi kelompok, baik bagi anggota maupun bagi masyarakat.
- b. Kepentingan praktis, dimaksudkan untuk memperoleh masukan tentang efisiensi dan kebaikan-kebaikan lain dari anggota kelompok.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran untuk meninjau tingkat keberhasilan yang telah tercapai. Dan dapat dinyatakan efektif apabila semua komponen yang menjadi tujuan organisasi atau program telah tercapai. Untuk mengukur efektivitas sebuah program ditentukan oleh tepat atau tidaknya sasaran yang ingin dicapai dan hasil yang diperoleh dari program tersebut.

Ukuran-Ukuran Efektivitas

Ada beberapa macam indikator yang bisa digunakan sebagai alat ukur efektivitas. Hal-hal yang harus diperhatikan supaya mencapai efektivitas organisasi baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang menurut (Sutrisno, 2018, hal. 106) ada 5 indikator, yaitu:

1. Produksi (*production*)
2. Efisiensi
3. Kepuasan
4. Adaptasi
5. Perkembangan

Menurut Gibson (1997) konsep efektivitas terdiri dari dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan tujuan untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi dapat diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan
2. Pendekatan sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain.

Lebih lanjutnya Gibson (1997) memberikan batasan dalam kriteria efektivitas organisasi melalui pendekatan teori sistem, yaitu:

1. Produksi : kemampuan organisasi memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan
2. Efisiensi : angka perbandingan (rasio) antara output dan input yang harus dinyatakan dalam perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan waktu atau dengan output
3. Kepuasan : menunjukkan sampai sejauhmana organisasi memenuhi kebutuhan para karyawan atau pengguna
4. Adaptasi : seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perubahan ekstern dan intern
5. Perkembangan : organisasi haru menginvestasi dalam organisasi itu sendiri untuk memperluas

kemampuannya untuk hidup terus dalam jangka panjang

6. Hidup terus : organisasi harus dapat hidup dalam jangka waktu panjang

Menurut Caplow dalam Steers (1985) mengatakan bahwa ada empat kriteria yang digunakan sebagai alat ukur efektivitas, ialah:

1. Stabilitas dalam pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya sepanjang waktu, khususnya dalam periode-periode sulit.
2. Integrasi yaitu pengukuran tingkat kemampuan organisasi untuk bersosialisasi.
3. Kesukarelaan
4. Prestasi

Sharma dalam Tangkilisan (2005) memberikan kriteria/ ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal dan faktor eksternal, meliputi:

1. Produktivitas organisasi atau *output*;
2. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam dan diluar organisasi;
3. Tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Mott dalam Steers (1985) mengatakan bahwa untuk mengukur atau melakukan evaluasi terhadap efektivitas organisasi dapat ditinjau dari 3 indikator, yaitu: (1) Produktivitas; (2) Fleksibilitas; dan (3) Kemampuan Adaptasi.

Adapun alat ukur efektivitas pada sebuah organisasi baik organisasi pemerintahan maupun organisasi lainnya menurut Makmur (2015) terdapat beberapa unsur, antara lain:

1. Ketepatan penentuan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan dalam pengukuran
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan
5. Ketepatan berpikir
6. Ketepatan dalam melakukan perintah
7. Ketepatan dalam melakukan tujuan
8. Ketepatan sasaran

Sementara Katz dan Kah (Steers, 1985) mengatakan bahwa dalam

mengukur sebuah efektivitas organisasi diperlukan indikator sebagai berikut:

1. Pertumbuhan
2. Penyimpanan kelangsungan
3. Kontrol terhadap lingkungan

Meskipun ada banyak kriteria yang dipakai sebagai evaluasi dari efektivitas, namun Steers (1985) mengemukakan bahwa kriteria yang paling banyak digunakan ialah:

1. Kemampuan menyesuaikan diri-keluwesan
Merupakan kemampuan organisasi untuk mengubah prosedur standar operasinya jika lingkungannya berubah, untuk mencegah kebakuan terhadap rangsangan lingkungan.
2. Produktivitas
Atas kuantitas atau volume dari produk atau jasa yang dihasilkan organisasi.
3. Kepuasan kerja
Merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi.
4. Kemampuan berlaba
5. Pencarian sumber daya

Sementara Gibson Tangkilisan (2005) mengemukakan bahwa efektivitas pada sebuah organisasi dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya saran dan prasarana
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Adapun Price (Steers, 1985) mengemukakan bahwa ada lima indikator yang digunakan sebagai alat ukur efektivitas, ialah:

1. Produktivitas
2. Konformitas
3. Semangat
4. Kemampuan adaptasi
5. Pelembagaan

Sementara menurut Duncan (Steers, 1985) ada tiga indikator sebagai alat ukur efektivitas, yaitu:

1. Pencapaian tujuan yaitu merupakan suatu proses yang menjadi bagian dari usaha keseluruhan suatu program. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan dari program yang dilaksanakan telah berjalan dengan optimal atau tidak. Indikator dari pencapaian tujuan ini yaitu kurun waktu, sasaran dan dasar hukum.
2. Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi dan pengembangan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Indikator integrasi terdiri dari prosedur dan proses sosialisasi.
3. Adaptasi ialah proses menyesuaikan diri yang dilakukan sebagai salah satu cara untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Adaptasi terdiri dari beberapa indikator yaitu peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

Menurut Steers (1985) mengidentifikasi 4 variabel yang berhubungan dengan efektivitas, yaitu:

1. Ciri organisasi
2. Ciri lingkungan
3. Ciri pekerja
4. Kebijakan dan praktek manajemen

Sedangkan menurut Sutrisno (2018) ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, ialah:

1. Karakteristik Organisasi, termasuk struktur dan teknologi;

2. Karakteristik Lingkungan, termasuk lingkungan interen dan lingkungan eksteren;
3. Karakteristik Karyawan, dan
4. Kebijakan Praktik Manajemen

Bila diurutkan berarti ada tujuh variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas, yaitu struktur, teknologi, lingkungan eksteren, lingkungan interen, keterikatan karyawan pada organisasi, prestasi kerja karyawan, dan kebijakan manajemen.

BLT Dana Desa

Pengertian BLT Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020, yaitu: "Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19."

Nilai bantuan langsung tunai dana desa adalah Rp. 300.000,- setiap bulan untuk masyarakat/ keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap selama dua belas bulan. Bantuan ini juga termasuk kedalam bantuan yang bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Di Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya terdapat 70 KK yang terdaftar sebagai masyarakat penerima manfaat BLT-Dana Desa.

METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara alamiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian

deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang ada pada masalah dan memusatkan pada masalah aktual yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan.

Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Subjek penelitiannya dilaksanakan dengan teknik *Purposive sampling*. Pertimbangan ini dimaksudkan untuk memilih sampel sumber data pada orang yang ahli dibidang yang sedang diteliti. (Sugiyono, 2018)

Dalam penelitian ini yang akan menjadi subyek/ informan adalah orang yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan program BLT-Dana Desa Di Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah: 1 Orang Kepala Desa, 1 Orang Kasi Kesejahteraan, 1 Orang Kepala Dusun, dan 10 Orang Masyarakat (Keluarga Penerima Manfaat)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan langsung tunai dana desa merupakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada keluarga miskin di deasa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi. Nilai bantuan langsung tunai dana desa adalah Rp. 300.000,- setiap bulan untuk masyarakat/ keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap selama dua belas bulan. Bantuan ini juga termasuk kedalam bantuan yang bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung

Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, penulis menggunakan triangulasi sumber, yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, dalm hal ini informan yang telah dipilih sebelumnya.

Analisis datanya adalah dengan *Reduksi data*, dilakukan dengan cara merangkum hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Proses reduksi data selama penelitian berlangsung dan penyajian hasilnya dilakukan secara terus menerus selama proses pengumpulan data berlangsung. Kemudian *Display data* yaitu menyajikan dalam bentuk matrik, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya sehingga peneliti tidak terjebak dalam setumpuk data yang tidak terstruktur. Terakhir, *Kesimpulan dan Verifikasi* merupakan kegiatan terakhir dalam analisis data. Bagian penarikan tanggapan dari semua data yang sudah dihasilkan kemudian menjadi hasil akhir dari penelitian guna mengetahui arti serta sebab akibat.

Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Selanjutnya pembahasan yang akan penulis bahas adalah untuk mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Jika hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tepat maka akan menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan bisa dikatakan tidak efektif. Oleh karena itu dalam mengukur efektivitas organisasi

bukanlah suatu hal yang sangat sederhana diperlukan suatu ukuran-ukuran efektivitas mengenai pencapaian tujuannya efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Duncan dalam (Steers, 1985, hal. 53). Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas pada penyelenggaraannya apakah sudah efektif atau malah sebaliknya belumnya efektif, dalam hal ini yang dimaksud adalah efektivitas bantuan langsung tunai dana desa di Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk mengetahui pelaksanaan efektivitas bantuan langsung tunai dana desa di Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, penulis menggunakan ukuran-ukuran efektivitas untuk mengukur dan menganalisa pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam artian pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu pentahapan, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit. Menurut Duncan dalam (Steers, 1985, hal. 53).

Pencapaian tujuan yang dimaksud dalam proses untuk memahami masalah untuk menghasilkan cara pemecahan dan menguji apakah cara pemecahan tersebut dapat dilaksanakan. Sistem informasi manajemen harus mengandung model keputusan untuk mengolah data dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan program bantuan langsung tunai desa di Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

Dari hasil penelitian melalui teknik wawancara dengan beberapa informan

menyatakan bahwa diketahui bahwa ukuran efektivitas pencapaian tujuan mendapat kejelasan dari ketiga parameter sudah berjalan dengan baik dimulai dari rencana kerjanya, kurun waktu yang telah ditentukan dan sasaran pekerjaan sudah berjalan dengan baik. Dimana pada parameter yang pertama rencana kerja digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program bantuan langsung tunai desa di Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya sudah optimal karena rencana kerjanya berdasarkan standar operasional prosedur yang telah tercantum dalam buku panduan BLT-Desa. Dan ketetapan waktu dalam penyelenggaraan program bantuan langsung tunai desa di Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya secara keseluruhan sudah terpenuhi namun tidak menutupi adanya tugas yang tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal waktu yang sudah ditentukan.

Dalam peraturan bupati no. 36 tahun 2020 menetapkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai desa dilakukan secara berkala yang dilaksanakan pada hari dan waktu yang telah ditentukan sehingga setiap warga atau keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan langsung tunai secara serentak dihari yang sama. Namun dilihat dari pelaksanaan pemberian bantuan terkadang selesai pada waktu yang telah ditentukan. Apabila ada keluarga penerima manfaat terlambat hadir maka bantuan dapat diambil ke kantor POS dengan jangka waktu tertentu. Dilihat dari hasil pekerjaan pegawai telah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan sebelumnya sudah dilaksanakan dengan baik secara keseluruhan. Namun perlu peningkatan serta perbaikan dimana yang akan datang agar tujuan dari adanya penyelenggaraan program bantuan langsung tunai ini lebih transparan.

2. Integrasi

Pengukuran terhadap tingkat suatu organisasi untuk mengadakan

sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya, integrasi menyangkut proses sosialisasi. Menurut Duncan dalam (Steers, 1985, hal. 53) terjemahan Dra Magdalena Djamin. Pada dimensi integrasi ini terdapat tiga parameter yang dikemukakan oleh penulis yaitu, koordinasi antar pegawai desa dengan dinas sosial, sosialisasi dilakukan dari dinas sosial kepada pegawai desa kemudian di sosialisasikan kembali kepada masyarakat yang meliputi penduduk dan masyarakat, dan komunikasi yang berjalan baik antar pegawai desa dengan kepala penduduk dan masyarakat.

Dari hasil penelitian penulis dengan teknik wawancara dengan beberapa informan menyatakan bahwa ukuran efektivitas program bantuan langsung tunai dana desa di desa cikadu kecamatan kawalu kabupaten tasikmalaya dari aspek integrasi yaitu adanya koordinasi yang berjalan dengan baik terlihat bahwa adanya koordinasi yang berjalan dengan baik terlihat bahwa adanya kerjasama antara pegawai Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dengan dinas sosial yang menangani pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa ini. Dari hasil wawancara mengenai aspek sosialisasi yang dilakukan pegawai Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya kepada kepala penduduk dan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Walaupun dalam pelaksanaannya sosialisasi dari pegawai desa ke masyarakat penerima manfaat kurang berjalan dengan baik, hal ini karena pada saat sosialisasi kepada KPM hanya dilakukan satu kali sehingga ada beberapa keluarga penerima manfaat yang kurang memahami terkait langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan pada saat pelaksanaan pembagian bantuan. Akan tetapi proses sosialisasi yang kurang maksimal ini didukung oleh proses komunikasi yang sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat bahwa pada saat

penulis melakukan wawancara yang dapat disimpulkan bahwa kejelasan komunikasi antar pihak dinas sosial dengan pihak desa dan pihak desa dengan keluarga penerima manfaat menjalin komunikasi dengan baik, baik komunikasi secara langsung maupun melalui media lain seperti telepon seluler.

3. Adaptasi

Dimana pusat perhatian pada output mengukur keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana adaptasi program bantuan langsung tunai dana desa adalah kemampuan organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya, untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. Menurut Duncan dalam (Steers, 1985, hal. 53) terjemahan Dra. Magdalena. Parameter kesatu adaptasi ialah adanya ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya yang sudah melaksanakan penyelenggaraan program bantuan langsung tunai dana desa ini.

Sarana merupakan segala sesuatu yang bisa dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang utama agar terselenggarakannya suatu proses kegiatan, maka sarana dan prasarana yang baik dan berkualitas sangat diperlukan pada setiap organisasi dimanapun dalam penyelenggaraan kegiatan untuk memperoleh tujuan yang diharapkan tanpa adanya sarana dan prasarana tidak mungkin tujuan akan tercapai dengan mudah. Demikian halnya dengan desa cikadu yang merupakan tempat untuk melakukan kegiatan.

Dari hasil penelitian penulis melalui observasi dan wawancara dengan beberapa informan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten

Tasikmalaya secara keseluruhan sudah memadai terutama dalam bidang pemberian bantuan langsung tunai dana desa dari segi kualitas dan kuantitasnya sudah baik, akan tetapi perlu adanya perbaikan peningkatan dimasa yang akan datang agar dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana maka pengelolannya pun akan baik, efektif dan efisien. Hal ini sangat diperlukan supaya semua kegiatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan langsung tunai dana desa ini dapat ditangani dengan baik dan transparan.

Pada dimensi adaptasi ini yang menjadi penentu dalam kegiatan penyelenggaraan pemberian bantuan langsung tunai dana desa ini yaitu ketersediaan sumber daya manusia atau pegawai dalam kegiatan pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya manusia atau pegawai dalam kegiatan pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya ini masih kurang. Hal ini dilihat penulis bahwa hanya terdapat enam orang pegawai desa yang menangani penyelenggaraan pemberian bantuan langsung tunai dana desa, diantaranya satu orang kepala seksi kesejahteraan dan lima orang pelaksana kewilayahan atau Kepala Dusun dan dari hasil wawancara terlihat bahwa dalam keterbatasan sumber daya manusia. Kemudian penulis melakukan observasi secara langsung kepada Kepala Dusun dan keluarga penerima manfaat bahwa kepala seksi kesejahteraan tidak memiliki anggota sehingga yang menangani penyelenggaraan bantuan langsung tunai dana desa ialah kasi kesejahteraan yang

dibantu oleh Kepala Dusun dan Bagian Sekretariat Desa.

Maka pelaksanaan penerapan ukuran-ukuran efektivitas bantuan langsung tunai dana desa di Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan secara keseluruhan yaitu:

- a. Pencapaian tujuan mengenai rencana kerja yang digunakan sebagai pedoman dalam program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dan ketepatan waktu dalam penyelenggaraan pemberian bantuannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh dinas sosial dan tercantum dalam peraturan bupati no. 36 tahun 2020.
- b. Integrasi mengenai kegiatan koordinasi, sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak desa dengan dinas sosial, instansi terkait, kepala punduh maupun dengan keluarga penerima manfaat.
- c. Adaptasi mengenai sarana dan prasarana disediakan oleh Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya secara lengkap.

Jadi dari uraian diatas, efektivitas bantuan langsung tunai dana desa berdasarkan kepada ukuran-ukuran efektivitas adalah salah satu cara untuk meningkatkan pencapaian efektivitas bantuan langsung tunai dana desa yang lebih baik oleh Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, pelayanan yang efektif dapat berarti tercapainya tujuan pelayanan yang telah ditetapkan di birokrasi dan masyarakat atau keluarga penerima manfaat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya sudah terlaksana dengan baik. Efektivitas program bantuan langsung tunai dana desa dilihat dari tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan proses adaptasi yang baik. Adanya komunikasi yang lancar antar pihak desa dan pihak terkait sehingga dapat meminimalisir masalah yang terjadi. Pengambilan keputusan pada bantuan langsung tunai dana desa tergolong keputusan terprogram karena keluarga penerima manfaat bukan penerima bantuan sosial lainnya sehingga masyarakat miskin akan mendapatkan bantuan yang merata serta adanya kerjasama yang baik antara pihak desa cikadu dengan pihak-pihak yang terkait seperti dinas sosial, kepala punduh dan keluarga penerima manfaat.

Akan tetapi, dalam program bantuan langsung tunai dana desa masih ada yang perlu diperhatikan kembali seperti sosialisasi kepada masyarakat harusnya tidak dilakukan satu kali saja karena tidak semua orang dapat langsung memahami langkah-langkah pada pelaksanaan pembagian bantuan langsung tunai dana desa terutama masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan akan timbul kecemburuan sosial. Dan masalah terakhir adalah perlu adanya peningkatan komunikasi kepadakeluarga penerima manfaat supaya tidak terjadi keterlambatan pengambilan bantuan.

Dari uraian diatas, efektivitas bantuan langsung tunai dana desa di Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan beberapa indikator-indikator efektivitas program adalah salah satu cara untuk pencapaian tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, J. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Lentera Ilmu Cendikia.
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. CV Pustaka setia.
- Djamin, M. (1995). *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. PT. Rineka Cipta.
- Gibson. (1997). *No Title*. <http://www.efektivitasonline.com>.
- Gie, T. L. (1981). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Graha Ilmu.
- Handyaningrat, S. (1990). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. CV. Haji Masagung.
- Hasibuan, M. S. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. PT. Bumi Aksara.
- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama.
- Moleong, L. . (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Ilmu.
- Siagian, S. P. (2006). *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara.
- Steers, R. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2018). *Budaya Organisasi*. Prenadamedia Group.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. Gramedia.
- Ukas, M. (2006). *Manajemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Agnini Bandung.

Sumber Lain:

- Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 (Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 (Tentang Prioritas

- | | |
|--|--|
| Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021) | Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021) |
| - Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 7 Tahun 2021 (Tentang Tata Cara | - Buku saku Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) |